

Strategi Peningkatan Kualitas Fisik di Sekitar Fasilitas Pendidikan pada Kawasan Permukiman Kumuh dalam Perwujudan Lingkungan Sehat di Kelurahan Mariso Kota Makassar

Muhammad Ikram Ulman Idris

Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar

Email: ikram.idris@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman: Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Upaya yang diambil pemerintah salah satunya dengan cara membuat program kota sehat di kota-kota di Indonesia. Kehadiran permukiman kumuh menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan banyaknya kegiatan warga yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak terkecuali di Makassar, tepatnya di Kecamatan Mariso. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab keberadaan permukiman kumuh di lokasi tersebut, dan bagaimana strategi penanganannya mengingat keberadaan fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar menghadirkan banyak sekali anak-anak. Disimpulkan bahwa penyebab utama keberadaan dari permukiman kumuh tersebut disebabkan oleh faktor domisili warga yang telah lama mendiami Kawasan Mariso dan kemudian mendirikan hunian dengan bahan utama kayu maupun seng sehingga menjadi kumpulan hunian semi permanen. Strategi yang diambil untuk menangani Kawasan permukiman kumuh ini yakni dengan melakukan peremajaan kondisi fisik, meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan dan menata sarana dan prasarana lingkungan termasuk pemeliharaan berkala. Lingkungan kota sehat bisa dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan seperti penyuluhan Kesehatan lingkungan, termasuk sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Lingkungan, Kota Sehat, Kualitas Fisik.*

Abstract

According to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlements: Settlements are part of a residential area consisting of more than one housing unit that has infrastructure, facilities, public utilities, and has supporting activities for other functions in urban areas or rural areas. One of the efforts taken by the government is by creating a healthy city program in cities in Indonesia. The presence of slum settlements causes degradation of environmental quality due to the many activities of residents who are not supported by inadequate facilities and infrastructure, including in Makassar, precisely in Mariso District. considering the existence of Elementary School Education facilities presents a lot of children. It was concluded that the main reason for the existence of the slum settlements was caused by the domicile factor of the residents who had long lived in the Mariso Area and then built dwellings with the main materials of wood and zinc so that they became a collection of semi-permanent dwellings. The strategy taken to deal with this slum area is by rejuvenating its physical condition, improving environmental sanitation conditions and managing environmental facilities and infrastructure including periodic maintenance. A healthy city environment

can be started by carrying out several activities such as environmental health counseling, including socialization and coaching to the community.

Keywords: *Environment, Healthy City, Physical Quality.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memaksa kota dan masyarakat untuk mengubah bagaimana merencanakan, merancang, membangun, mengelola dan mengevaluasi kota agar dapat layak untuk dihuni sehingga menunjang kesehatan masyarakat yang bermukim. Kondisi lingkungan kota yang bersih, nyaman dan aman serta tertata berdasarkan kesehatan lingkungan merupakan gambaran dari konteks kota sehat. Kota sehat sendiri merupakan gagasan yang lama sekaligus baru. Lama disebabkan sudah lama masyarakat berusaha membuat kota agar nyaman dan aman atau dikatakan sehat sejak awal *urban civilization*, sedangkan baru disebabkan manifestasi sebagai promosi kesehatan dibidang kesehatan masyarakat baru dalam sehat untuk semua atau *health for all* (Soedirham, 2012). Saat ini pemerintah di Indonesia berupaya agar di setiap wilayah di Indonesia memiliki lingkungan kota yang sehat. Hal ini didasari agar masyarakat nyaman, aman, bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan produktivitas, sarana dan prasarana, serta perekonomian masyarakat Indonesia. Terkait hal tersebut pemerintah bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan pada tahun 2005 untuk Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat menetapkan pedoman penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan Kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar No.826/653.2/Th 2018 Kota Makassar memiliki jumlah permukiman kumuh yang terbilang cukup besar yaitu 650,74 hektar. Terjadinya urbanisasi yaitu pergeseran lokasi tempat tinggal masyarakat dari pedesaan menuju perkotaan menjadi salah satu yang menyebabkan terciptanya permukiman kumuh. Fenomena tersebut terjadi disebabkan tingginya upah yang diperoleh masyarakat di daerah tujuannya. Kesenjangan upah yang besar antara desa dan kota mendorong penduduk desa untuk datang ke kota. Dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 telah menyentuh angka 1,4 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 1.339.374 jiwa, sehingga penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 0,60 persen. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,26 persen. Dengan luas wilayah 175,77 km², maka kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.122 jiwa/Km² (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2022),

Adanya ketimpangan antara masyarakat yang tingkat ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah dikarenakan kondisi ketersediaan lahan di Kota Makassar tidak mampu mengimbangi antara persediaan lahan dan juga permintaan. Karena kondisi tersebut maka hanya masyarakat yang mampu dari segi ekonomi yang bisa tinggal di permukiman yang layak. Kondisi tersebut terjadi di beberapa kecamatan di Kota Makassar, salah satunya berada di Kecamatan Mariso. Kecamatan Mariso terdiri dari 8 kelurahan yang dimana hampir seluruh kelurahan termasuk dalam kategori kawasan kumuh, sedang, hingga berat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar No. 826/653.2/Tahun 2018 tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar yaitu Kelurahan Mariso yang berada pada Kecamatan Mariso tergolong dalam wilayah dengan kategori kumuh berat dengan luas 1,68 Hektar.

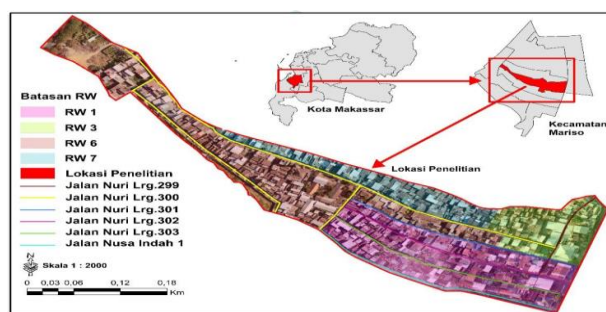
Pentingnya penanganan permukiman kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan kota sehat

di Kelurahan Mariso yaitu agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, bersih serta sehat. Tujuan dari diadakan upaya tersebut agar terciptanya lingkungan kota yang bersih dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan kenyamanan para pelajar untuk mengakses dan mengenyam Pendidikan mereka di Kelurahan Mariso. Dengan diadakannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah (stakeholder) maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bersama-sama peduli akan lingkungan sekitar seperti melakukan penghijauan, melakukan sosialisasi antara pemerintah atau lembaga yang bergerak dibidang lingkungan hidup kepada masyarakat mengenai lingkungan kota sehat. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan munculnya Kawasan permukiman kumuh di lokasi penelitian, dan apa saja upaya untuk mendapatkan strategi peningkatan kualitas fisik di sekitar sarana Pendidikan pada Kawasan Permukiman Kumuh dalam Mewujudkan Lingkungan Kota Sehat Di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso. Kota Makassar.

METODE

Secara administratif lokasi dalam penelitian ini berada di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan luas wilayah sebesar 0,18 Km². Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Kelurahan Mariso masih terdapat permukiman kumuh dan tergolong berat berdasarkan SK Walikota Makassar dengan luas kumuh yaitu 1,68 Ha atau 9,33% dari luas Kelurahan Mariso. Waktu penelitian berada pada rentang bulan Mei hingga Oktober 2022. Sumber data primer pada penelitian ini adalah survey lapangan di Kelurahan Mariso dengan melakukan pengamatan pada kondisi jalan, bangunan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, legalitas tanah dan kondisi ekonomi serta sosial masyarakat. Adapun data sekunder yakni RTRW Kota Makassar, BPS Kota Makassar, serta data pengelolaan limbah dari dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey lapangan, wawancara langsung, telaah Pustaka dan dokumentasi pada lokasi penelitian.

Populasi pada penelitian ini adalah warga yang bermukim di Kelurahan Mariso, dengan variabel penelitian yang dijadikan fokus dalam studi ini yakni variabel bebas dan terikat. Metode analisis yang akan digunakan yakni analisis triangulasi sumber dan juga analisis deskriptif kualitatif. Ruang lingkup wilayah pada studi ini secara khusus terletak pada RW 1, RW 3, RW 6, dan RW 7 Kelurahan Mariso, kota Makassar.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian, Sumber: Olahan ArcGIS 2022

Batasan materi pada penelitian ini adalah rumah rumah kumuh yang berada di antara rumah layak huni di lokasi penelitian, sehingga hanya sebagian wilayah di kelurahan Mariso saja yang masuk dalam cakupan studi. Kemudian penelitian ini mencoba mencari faktor penyebab munculnya rumah rumah kumuh di lokasi penelitian serta apa saja upaya yang diambil untuk menciptakan lingkungan sehat di sekitar Kawasan Pendidikan pada kelurahan Mariso. Sehingga keluaran dari studi ini adalah mencari strategi penanganan Kawasan kumuh di sekitar sarana Pendidikan yang ada di kelurahan Mariso untuk mewujudkan lingkungan yang sehat di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

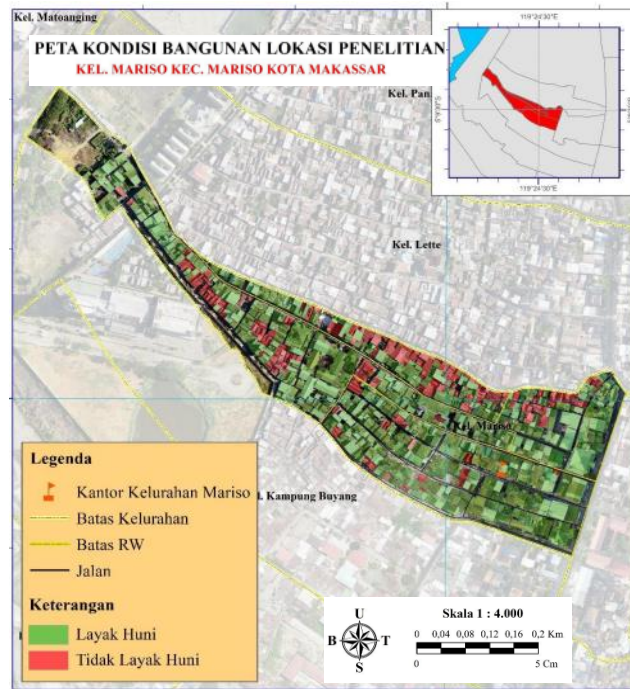
Kota Makassar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan letak astronomis antara 119°24'17'38" BT sampai 5°08'06'19" LS atau berada di pesisir barat daya pulau Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Secara administrasi Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar memiliki luas wilayah sebesar 175,77 Km² yang terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan, termasuk di antaranya adalah Kecamatan Mariso, Kelurahan Mariso. Kota Makassar pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.427.619 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 8.122 jiwa/Km². Jumlah penduduk Kecamatan Mariso tahun 2022 berjumlah 57.594 jiwa dengan kepadatan penduduk per kilometernya adalah 31.645 jiwa/km². Berdasarkan RTRW Kota Makassar 2010-2030, pola penggunaan lahan di kelurahan Mariso dibagi menjadi 6 penggunaan lahan yang ditampilkan pada tabel 1.

Tabel.1 Penggunaan Lahan di Kelurahan Mariso

No	Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)
1	Permukiman	0,169
2	Rawa	0,004
3	Semak	0,003
4	Sungai	0,002
5	Taman	0,001
6	Tambak	0,001
Total		0,18

Sumber: RTRW Kota Makassar 2010-2030

Secara umum di kelurahan Mariso terdapat 1.522 unit bangunan yang kebanyakan terdiri atas rumah warga serta fasilitas lainnya (Kesehatan Pendidikan, peribadatan dan lain sebagainya). Untuk fasilitas Kesehatan terbanyak di kelurahan Mariso adalah praktek dokter sebanyak 2 unit. Sedangkan fasilitas Pendidikan terbanyak yang menjadi bagian yang mendapat perhatian pada studi ini terdapat 6 SD yang salah satu di antaranya terletak di lokasi studi, sedangkan sarana Pendidikan lain berupa TK, SMP, dan SMA/SMK. Masjid merupakan fasilitas peribadatan terbanyak dengan 5 unit. Sedangkan untuk fasilitas perkantoran terdapat kantor Lurah dan fasilitas jasa didominasi oleh warung/toko.



Gambar 2. Kondisi Bangunan di Lokasi Penelitian

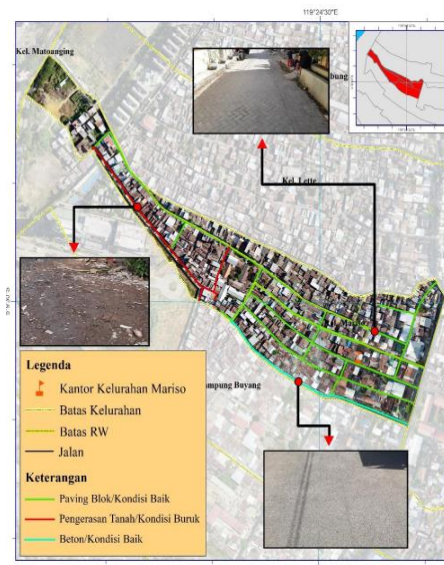
Sumber: Hasil Olahan ArcGIS 2022

Pada lokasi studi, terdapat 831 unit bangunan yang secara rinci terdiri atas 187 unit hunian yang tidak layak huni, yang secara detail bisa disimak pada gambar 2. Sedangkan jalan selaku penunjang aktivitas warga di kelurahan Mariso Sebagian besar dalam kondisi paving block (gambar 3). Adapun untuk kondisi drainase lingkungan pada lokasi studi terbagi atas drainase yang tertutup maupun terbuka, dengan lebar rata rata kurang lebih 25 hingga 35 cm. Untuk pengelolaan air limbah masih terdapat beberapa unit hunian yang sistem pembuangan air limbahnya langsung dibuang ke drainase/kanal. Secara detail dapat dilihat pada tabel 2. Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat sekitar karena kondisi pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap.

Tabel 2. Kepemilikan Sptic Tank di Lokasi Studi

No	ORW	Jumlah Unit Bangunan	Septic Tank
1	01	268	0
2	06	254	0
3	03	134	14
4	07	175	46
Jumlah		831	60

Sumber: Observasi dan Dinas PU Kota Makassar Tahun 2022



Gambar 3. Kondisi Konstruksi Jalan di Lokasi Studi
Sumber: Olahan ArcGIS 2022

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu.

Faktor Penyebab Kehadiran Pemukiman Kumuh di Lokasi Studi

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri atas perwakilan ketua RW, Ketua RT, aparat kelurahan, dan warga setempat yang telah mendiami lokasi penelitian sejak waktu lama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor penyebabnya adalah kondisi ketersediaan infrastruktur yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengelolaan air limbah maupun pengelolaan sampah yang buruk. Selain itu permukiman yang dibangun tanpa acuan yang terkait dengan penataan juga menjadi salah satu faktor penyebab kondisi kekumuhan di lokasi studi. Kondisi fisik bangunan yang didominasi oleh seng dan juga kayu menambah kurang idealnya visual pada lokasi penelitian. Ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang bisa terbilang rendah, sehingga menyulitkan mereka mengubah pola hidup dengan mengubah huniannya menjadi hunian yang layak untuk ditinggali. Untuk detail informan dan pertanyaan dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut.

Tabel 3. Daftar Nama Informan Wawancara Triangulasi Sumber

No	Nama Informan	Jabatan	Alamat
1	Jalaludin (informan 1)	Ketua RW 07	Jl. Nuri Lr.300 No.52A
2	Intan (Informan 2)	Ketua RT 2 RW 06	Jl. Nuri Lr.300 Stp.1
3	Kasmawati (Informan 3)	Staf Kelurahan Mariso	Jl. Nuri Lr.302
4	Munawir (Informan 4)	Warga	Jl. Nuri Lr.301

Sumber : Observasi Lapangan, 2022

Tabel 4. Triangulasi Sumber

Pertanyaan	Informan		Pola
Apa faktor yang menyebabkan masih terdapat permukiman kumuh atau tidak layak huni pada lokasi penelitian ini?	Informan 1	Informan 2	Pengelolaan air limbah yang belum terpenuhi Drainase yang tidak memadai Permukiman yang tidak tertata Kondisi ekonomi yang rendah Kurangnya kesadaran masyarakat
	Disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang rendah dikarenakan masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian dan masih terdapat rumah yang belum mempunyai septic tank. Selain itu watak yang dimiliki masyarakat sudah terbiasa akan hal seperti sampah yang berserakan dimana-mana, masih terdapat masyarakat yang langsung membuang sampah ke drainase dan juga kanal sehingga mencemari lingkungan. Masyarakat yang melakukan hal tersebut umumnya tidak melakukan pengangkutan sampah yang telah disediakan.	Penanganan drainase yang buruk sehingga jika air laut naik maka lingkungan yang ditinggali akan banjir apalagi jika terjadi hujan. untuk kondisi jalan masih tanah/pengerasan. Sementara kondisi persampahan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sehingga masih terdapat sampah berserakan baik di jalan maupun di drainase. Serta masih terdapat rumah rumah yang masih memakai seng ataupun kayu dan pembangunannya tidak teratur (semrawut) yang tidak memenuhi syarat untuk rumah layak huni sehingga masih dapat dikatakan kumuh atau tidak layak huni.	
	Informan 3	Informan 4	
	Pola hidup yang buruk dari masyarakat setempat seperti tidak memperhatikan lingkungan	Pembangunan rumah yang tidak tertata oleh beberapa masyarakat dan tidak memperhatikan kondisi	

contohnya buang sampah ke drainase maupun kanal. sehingga terdapat drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan tersumbat sehingga membuat genangan yang terjadi pada RW 6 sementara untuk RW 7 dan 3 kondisi kanal sangat buruk alias tercemar oleh sampah dan limbah masyarakat	lingkungan menjadi salah satu penyebab masih terdapatnya rumah-rumah yang tidak layak huni pada Kelurahan Mariso serta faktor sosial masyarakat seperti masyarakat tidak peduli akan kondisi bangunan tempat tinggal mereka asalkan dekat dengan keluarga, tanpa berusaha mencari lingkungan tempat tinggal yang baik. Pola hidup seperti itu menyebabkan terus terjadi permukiman kumuh jika tidak ditangani.
---	---

***Sumber:** Hasil Wawancara, 2022*

Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Kondisi Lokasi Studi

Pada bagian ini dilakukan wawancara terhadap staf Dinas PU Kota Makassar dan Staf Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2018 Tentang pencegahan Penulisan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, dapat dilakukan penanganan di Lokasi studi, dengan beberapa upaya non fisik yaitu dengan pembinaan perbaikan pada bangunan yang ditinggali serta menjaga fasilitas public seperti membersihkan drainase lingkungan dan penghijauan dengan penanaman pohon. Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan secara fisik yakni diantaranya:

1. Penataan letak, desain, jalur drainase dan jalan, serta ukuran plot yang bisa didanai dengan kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan Lembaga donor
2. Revitalisasi dengan pendekatan penanganan fisik seperti penggalian atau pelebaran saluran agar dapat menampung limpasan air hujan.
3. Penanganan untuk pengelolaan air limbah dengan sistem pengelolaan on-site menggunakan bioseptic tank. Bioseptic tank ini memiliki 3 sekat, yakni yang pertama sebagai pemisah kotoran padat dan cair, kemudian filter air kotor, dan filter pengurai bakteri pada air kotor yang secara langsung juga bisa dimanfaatkan untuk mengurai kotoran pada septic tank
4. Untuk fasilitas persampahan dilakukan dengan 2 metode pengumpulan sampah, yakni pengumpulan secara individual maupun komunal.
5. Peremajaan atau revitalisasi yang terakhir adalah pola penanganan fisik untuk proteksi kebakaran sesuai dengan yang telah diatur oleh Permen PU No.26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Upaya Mewujudkan Lingkungan Kota Sehat pada Lokasi Studi

Berdasarkan hasil analisis maka upaya yang dapat dilakukan yakni dengan cara:

1. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan.
2. Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan, dengan merujuk pada Inpres No.12 Tahun 2016 dan juga Kep Mendagri Nomor 650-185 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat untuk membangun kembali kesadaran

seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sehat.

SIMPULAN

Faktor penyebab keberadaan permukiman kumuh pada lokasi penelitian disebabkan oleh masyarakat setempat yang telah menetap sejak waktu lama dan diteruskan secara turun temurun dengan mendirikan rumah dengan kondisi semi permanen dengan menggunakan bahan bangunan utama berupa seng maupun kayu/rotan, sehingga meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni di lokasi penelitian. Selain itu kondisi sanitasi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, ditambah dengan kondisi ekonomi warga yang terbelah rendah sehingga menyebabkan tatanan permukiman menjadi tidak teratur, tanpa memperhatikan estetika lingkungan.

Strategi penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan pada lokasi studi yakni melakukan revitalisasi dengan cara perbaikan fisik Kawasan, termasuk penataan secara menyeluruh terhadap rumah/hunian yang termasuk dalam kategori tidak layak huni (RTLH), upgrading kualitas sanitasi pada lokasi, serta penataan sarana dan prasarana ataupun utilitas umum dan lingkungan fisik, kemudian melakukan pemeliharaan lingkungan sehingga tatanan permukiman dapat menjadi lebih rapi secara estetika dan fungsi.

Adapun upaya mewujudkan lingkungan kota sehat pada lokasi penelitian yang khususnya memiliki sarana Pendidikan, yaitu dengan melaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan lingkungan dengan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan anak-anak terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat. Diharapkan adanya pembinaan masyarakat sadar lingkungan dengan membuat lembaga atau kelompok kerja agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan secara paralel bisa meningkatkan kualitas Pendidikan warga di kelurahan Mariso.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 11(2), 1–21
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia (2020)
- Surat Keputusan Walikota Tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar. (2018)
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka 2021
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. 80(5), 339–344
- Rofiana, V. (2015). Dampak Pemukiman Kumuh Terhadap Kelestarian Lingkungan Kota Malang (Studi Penelitian di Jalan Muharto Kel Jodipan Kec Blimbing, Kota Malang)
- Sonalitha, E., Yudhistiro, K., Soelaksono, A. G., Putri, D. M., & Roikhah, E. (2019). Kota Sehat Kelurahan Gadingkasri Kota Malang. *Jurnal Masyarakat Merdeka*, Vol.2 No.2
- Bachmid, F., & Ariyanto. (2017). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate. *Plano Madani*, Vol.6 No.2
- Thandzir, M. (2019). Paradigma Kota Sehat dan Sapta Pesona Pariwisata. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Vol.1 No.2: 55-60
- Soedirham, O. (2012). Kota Sehat Sebagai Bentuk Sustainable Communities Best Practice Healthy City

- as Sustainable Communities Best Practice Form. Hal.51–55.
- Darmansyah, A., Sudaryono, & Deva Fosterharoldas Swasto. (2019). Perubahan Permukiman Nelayan Pasca Reklamasi Pantai Di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Makassar. *Teknosains*, Vo.8 No.2.
- Hariyanto, A. (2007). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Unisba*, Vol.7, No 2
- Sandi, R. (2021). Identifikasi Pemukiman Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Pemukiman di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo
- Ramadhani, A., & Aslinda, A. (2019). Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.